**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI PROPINSI BANTEN**

**Hilman**

Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung

[hilmanzr@gmail.com](mailto:hilmanzr@gmail.com)

**Bambang Heru**

[bambangheru3010@gmail.com](mailto:bambangheru3010@gmail.com)

**Eddy Yusuf**

[**eddyjusuf@unpas.ac.id**](mailto:eddyjusuf@unpas.ac.id)

**Abstrak**

Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi publik di propinsi Banten dilaksanakan berdasarkan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik. Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Tatakelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam Implementasi belum maksimal karena tidak ditunjang dengan kapasitas sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta dukungan sumberdaya lainnya. penelitian ini untuk melihat lebih jauh peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta strategi Kebijakan pengembangan sumberdaya dalam rangka mencapai katagori Propinsi Informatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Mix method. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Implementasi Kebijakan keterbukaan Informasi Publik dalam pengembangan sumberdaya PPID diantaranya penguatan Regulasi, sumberdaya manusia, dan anggaran; (2) Strategi yang diterapkan belum maksimal maka strategi yang dapat di terapkan agar kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana adalah (a) strategi dengan menerbitkan peraturan Gubernur tentang implementasi keterbukaan informasi publik yang mengakomodasi berbagai kepentingan ; (b) strategi untuk mencapai Propinsi Banten dengan Katagori informatif tingkat nasional maka penguatan Sumber daya manusia di PPID Utama perlu ditingkatkan; (c) strategi penguatan pada sumberdaya manusia, sumber daya anggaran yang memadai, dan regulasi tentang keterbukaan informasi publik akan menjadikan propinsi Banten menjadi propinsi dengan katagori informatif.

*Kata Kunci : Keterbukaan informasi publik, pengembangan Sumberdaya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Banten Informatif*

1. **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar 45 pasal 28 F menyebutkan bahwa *“ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Hal ini mengindikasikan bahwa negara hadir dan telah menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warganya.

Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanat reformasi tahun 1998, maka pemerintah propinsi Banten mengambil bagian salah-satunya dengan membentuk Komisi informasi (KI) propinsi Banten pada tahun 2011. Komisi informasi di bentuk dalam rangka menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tatakelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan peraturan daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di propinsi Banten. Maka untuk menindaklanjuti peraturan daerah tersebut pemerintah propinsi Banten menerbitkan Keputusan Gubernur nomor : 499.05/kep.216-Huk/2013, Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113.huk/2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah propinsi Banten.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana belum menunjukan hasil yang signifikan, hal ini terbukti adanya peningkatan permohonan sengketa informasi (PSI) yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Komisi Informasi sejak tahun 2011 sampai tahun 2021. sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 dibawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Permohonan Sengketa Informasi** |
| 2011 | 28 Register |
| 2012 | 117 Register |
| 2013 | 450 Register |
| 2014 | 257 Register |
| 2015 | 387 Register |
| 2016 | 89 Register |
| 2017 | 392 Register |
| 2018 | 85 Register |
| 2019 | 57 Register |
| 2020 | 156 Register |
| 2021 | 143 Register |

*Tabel 1.1*

*Data permohonan penyelesaian sengketa informasi*

Pemeringkatan Badan Publik yang menjadi program komisi informasi Pusat (KIP) dilaksanakan setiap tahun dengan berpedoman pada Peraturan komisi informasi (PERKI) nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi keterbukaan informasi badan Publik, pemeringkatan badan publik (BP) dilaksanakan dalam rangka memastikan badan publik untuk benar-benar menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publk (KIP) terutama pada aspek bagaimana Sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, anggaran dan regulasi. Pemerintah propinsi Banten memiliki kewajiban dalam melaksanakan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik , maka diperlukan Strategi implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengembangan sumber daya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Bantenhal ini dilakukan dalam rangka mencapai propinsi Banten sebagai badan publik yang informatif.

**2. LANDASAN TEORI**

**Administrasi Publik**

Menurut Keban (2014:5) administrasi publik merupakan “produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi ini mempunyai makna administrasi publik sama dengan kegiatan ekonomi dan yang dihasilkan adalah barang dan pelayanan publik”. Pendapat Keban tersebut memandang bahwa administrasi publik sebagai kegiatan yang memproduksi barang dan jasa berupa pelayanan publik.

Adminsitrasi publik adalah semua yang diperoleh oleh pemerintah atau pilihan pemerintah yang dilakukan sesuai janji pada waktu kampanye pemilihan, hal ini seperti yang dikemukanan oleh Starling dalam Eddy (2011:42); Administrasi sebagai semua yang di capai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik. Pendapat ini menunjukan bahwa pada waktu kampanye, kandidat telah mengeluarkan janji-janji. Oleh karena itu administrasi publik membantu pemerintah untuk mengakomodasikan atau mewujudkan janji tersebut.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut diatas, dimana perhatian administrasi publik erat kaitannya dengan kebijakan, maka penulis uraikan mengenai kebijakan publik, mengingat bahwa Strategi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumber daya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten merupakan produk dari kebijakan publik tentang Hak asasi manusia (HAM).

**Kebijakan Publik**

William N. Dun (2003: 24), menyatakan bahwa tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu dimana setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dengan karakteristik setiap tahapan. Dunn lebih lanjut menyatakan bahwa analisis kebijakan dapat memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu tahap, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan tergantung pada tipe masalah yang dihadapi oleh klien yang dibantunya.(2003: 22).

Fredrich diaktualisasikan oleh Seibel (2015: 74) menjelaskan kebijakan publik sebagai :Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat Dunn, maka dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari permasalahan kebijakan adalah saling ketergantungan dari masalah kebijakan; subyektivitas dari masalah kebijakan; sifat buatan dari masalah dan dinamika masalah kebijakan yang saling kait mengkait yang memerlukan pemecahannya.

**Implementasi Kebijakan Publik**

Model Mazmanian dan Sabatier diaktualisasikan oleh Gustama (2013: 128) disebut model kerangka Analisis implementasi ( a framework for implementation analysis). Hal tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable. *Pertama*, varibel independen yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan. *Kedua*, varibel intervening yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. *Ketiga*, variable devenden, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

**Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam Undang-undang Dasar 45 pasal 28 F di sebutkan bahwa *“ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Pasal 28 F ini mengindikasikan bahwa negara hadir dan menjamin dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warganya. Maka untuk mewujudkan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut perlu di terbitkan undang-undang dan regulasi turunannya, hal ini dilakukan untuk memastikan implementasinya pada tataran praktis di Badan Publik maupun bagi Masyarakat penggunanya.

**Sumberdaya**

Sumberdaya juga dikemukakan oleh Gareth R. Jones dan Jennifer M. George *“ and organization’s resources include assets such as people and their skills and knowledge; machienery; raw materials; computers and information technology ; and financial capital”.* Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia, finansial, dan material lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka meningkatkan keterampilan yang dimiliki pegawai, demi memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi di organisasi.

**3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* (penelitian campuran) dengan strategi concuren embedded yaitu dengan desain penelitian kombinasi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dua metode sekaligus (kualitatif dan kuantutatif). Menurut Creswell (2010:5), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kombinasi (*mixed method)* adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Obyek Penelitian**

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) yang ada di 38 organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah daerah propinsi Banten, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijkan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan Sumberdaya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Propinsi Banten, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: (a) Faktor Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Banten; (b) Faktor Pengembangan sumberdaya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan (c) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi kebijakan keterbukaan informasi Publik dalam pengembangan Sumber daya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentsi (PPID).

Regulasi keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi Banten bermuara pada tercapainya status propinsi dengan katagori Informatif ,Maka untuk melihat lebih jauh tentang kebijakan tersebut perlu penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Organisasi perangkat daerah yang ada di Propinsi Banten. Salah satu peran Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyiapkan bentuk informasi publik berupa hardcopy dan sofcopy dari informasi publik yang dikuasainya. Maka untuk melihat lebih rinci tentang dampak peran Badan publik terhadap layanan informasi tersebut dapat dilihat dari jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang sudah di register oleh kepaniteraan komisi informasi tahun 2015 sampai tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) |
| 2015 | 378 Register |
| 2016 | 89 Register |
| 2017 | 392 Register |
| 2018 | 85 Register |
| 2019 | 57 Register |
| 2020 | 156 Register |
| 2021 | 145 Register |

Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2019, 2020, dan 2021 menunjukan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan hasil penilaian dengan katagori Informatif adalah organisasi perangkat daerah yang relatif sudah memilki berbagai sumberdaya baik sumberdaya manusia dan komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi pubk, hal ini dapat dilihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi toleh komisi informasi tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel Hasil Monev 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Organisasi Perangkat Daerah** | **Nilai** | **Kualifikasi** |
| 1 | Badan Perencanaan Pembanguna Daerah | 94,95 | Informatif |
| 2 | Dinas Komunikasi, informatikan, statistik dan persandian | 92,20 | Informatif |
| 3 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | 90,53 | Informatif |
| 4 | Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana | 80,16 | Menuju Informatif |
| 5 | Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman | 72,26 | Cukup Informatif |
| 6 | Biro Pemerintahan sekretaris daerah | 72,10 | Cukup Informatif |
| 7 | Biro administrasi Pembangunan Daerah | 68,79 | Cukup Informatif |
| 8 | Dinas kesehatan | 66,41 | Cukup Informatif |
| 9 | Badan Penguhubung | 66,06 | Cukup Informatif |
| 10 | Dinas Pertanian | 66,53 | Cukup Informatif |

*Sumber: Hasil penilaian Monev Badan Publik tahun 2019*

Merujuk pada hasil capaian setiap badan publik pada tahun 2020 hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terdapat perubahan cukup signifikan dalam capaian katagori bagi organisasi perangkat daerah di propinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam keputusan Ketua Komsi Informasi Propinsi Banten nomor 07/SK-BP/KI Banten/XI/2020 tentang hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik di propinsi Banten tahun 2020, hal ini dapat dilhat dalam tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.5**

**Hasil Monev tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama OPD** | **Nilai** | **Kualifikasi** |
| 1 | Dinas Komunikasi, informatikan, statistik dan persandian | 90,54 | Informatif |
| 2 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | 88,63 | Informatif |
| 3 | Badan Perencanaan Pembanguna Daerah | 88,37 | Informatif |
| 4 | Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah | 87,96 | Informatif |
| 5 | Badan Penguhubung | 80,52 | Menuju Informatif |
| 6 | Biro Pemerintahan sekretaris daerah | 80,36 | Menuju Informatif |
| 7 | Dinas perpustakaan dan kearsipan | 78,59 | Menuju Informatif |
| 8 | Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana | 74,09 | Cukup Informatif |
| 9 | Biro Administrasi dan Pembangunan | 73,68 | Cukup Informatif |
| 10 | Sekretariat DPRD | 69,14 | Cukup Informatif |

*Sumber: Hasil penilaian Monev Badan Publik tahun 2020*

Pada monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu terdapat 25 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Komsi Informasi Propinsi Banten nomor 006/SK-BP/KI Banten/XI/2021 tentang hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik di propinsi Banten tahun 2021. Peningkatan capaian tersebut setelah dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun rincian capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel**

**Hasil Monev tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama OPD** | **Nilai** | **Kualifikasi** |
| 1 | Dinas Komunikasi, informatikan, statistik dan persandian | 92,41 | Informatif |
| 2 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | 91,83 | Informatif |
| 3 | Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah | 91,19 | Informatif |
| 4 | Badan Penguhubung | 90,04 | Informatif |
| 5 | Dinas Pertanian | 87,84 | Informatif |
| 6 | Satuan polisi Pamong praja | 85,23 | Informatif |
| 7 | Sekretariat DPRD | 85,17 | Informatif |
| 8 | Inspektorat | 83,36 | Menuju Informatif |
| 9 | Badan Perencanaan pembangunan Daerah | 82,73 | Menuju Informatif |
| 10 | Biro Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 82,44 | Menuju Informatif |
| 11 | Biro Administrasi Pimpinan | 80,52 | Menuju Informatif |
| 12 | Biro Bina Perekonomian dan administrasi Pembangunan | 80,08 | Menuju Informatif |
| 13 | Dinas Perindustrian dan perdagangan | 80,03 | Menuju Informatif |
| 14 | Badan Pendapatan daerah | 79,76 | Menuju Informatif |
| 15 | Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana | 79,26 | Menuju Informatif |
| 16 | Dinas Kelautan dan perikanan | 78,56 | Menuju Informatif |
| 17 | Biro Organisasi dan Reformasi | 77,32 | Menuju Informatif |
| 18 | Badan Pengembangan Sumber daya manusia | 75,93 | Menuju Informatif |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 75,85 | Menuju Informatif |
| 20 | Dinas Energi dan sumber daya mineral | 65,17 | Menuju Informatif |
| 21 | Dinas Kelautan dan perikanan | 63,88 | Cukup Informatif |
| 22 | Biro Umum | 62,57 | Cukup Informatif |
| 23 | Dinas Perumarakyat dan permukiman | 62,06 | Cukup Informatif |
| 24 | Dinas Sosial | 61,39 | Cukup Informatif |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | 61,15 | Cukup Informatif |

Melihat hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di organisasi perangkat daerah propinsi Banten sejak tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan capaian ada peningkatan komitmen dari PPID pelaksana, dengan capaian Cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Capaian katagori tersebut secara khusus diakui oleh pemohon informasi Publik Bapak Badru Tamami bahwa layanan tersebut ada peningkatan dari pengelolaan website serta para petugas mengetahui tentang tatacara pemberian informasi publik, adapun pernyataannya sebagai berikut :

Pendidikan dan pelatihan kepada para staf yang bertugas dalam layanan informasi publik saat ini sangat mendesak dilaksanakan, karena berkaitan dengan proses penilaian dari komisi informasi pusat yang tahapannya dimulai dari bulan Juni setiap tahunnya. Maka kesiapan dari pemerintah propinsi Banten melalui PPID utama yaitu dinas komunikasi informatika statistic dan persandian harus lebih di perhatikan.

**Sumberdaya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Sumberdaya merupakan segala hal yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya yang terdiri dari sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya fisik, sumberdaya finansial dan sumberdaya sistem teknologi. Pengembangan sumber daya terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana di propinsi Banten merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, hal ini karena capaian katagori propinsi Informatif tingkat nasional akan berangkat dari kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya untuk menjalan program dan berbagai regulasi keterbukaan informasi publik yang ada saat ini. Pengadaan sumberdaya manusia yang memahami tentang keterbukaan informasi publik tentu membutuhkan proses. Hal ini terjadi karena sekretaris di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menurut keputusan Gubernur nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah propinsi Banten, telah menempatkan sekeretaris OPD menjadi PPID Pelaksana.

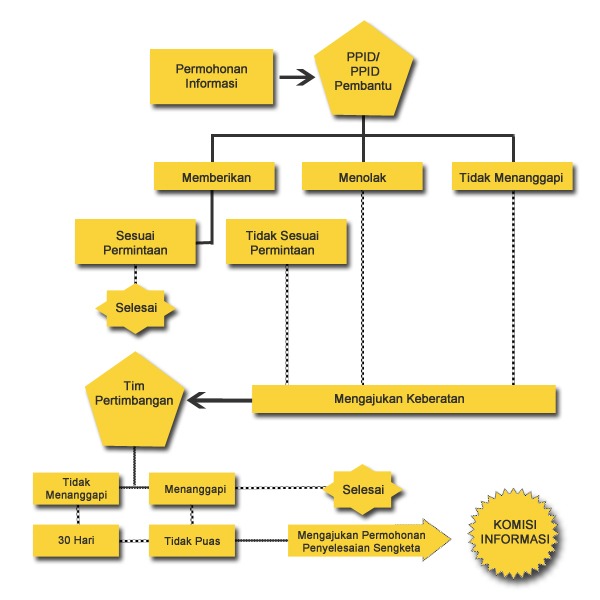
**Strategi Impelementasi kebijakan keterbukaan informasi Publik**

Untuk mendapatkan strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten, terlebih dahulu akan dilakukan kajian tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam penegmbangan sumberdaya yang sedang berjalan. Kalau dilihat dalam strategi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Banten saat ini adalah dengan menggunakan berbagai saluran media social yang ada. Maka penyediaan Internet yang stabil di setiap badan publik akan turut andil dalam penyebaran inforamsi ke masyarakat. Penduduk di Banten saat ini telah banyak menggunakan jaringan media sosial seperti facebox, Instagram, Watchup, Twitter, dan yang lainnya.

Strategi layanan informasi publik harus mengacu pada ketentuan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang terbaru yaitu PERKI 1 tahun 2021. Alur permohonan informasi sebagai mana terlihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar

**Alur Permohonan Informasi Publik**



**Karakteristik Kebijakan**

Karakteristik kebijakan yang utama adalah adanya kepastian hukum terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di propinsi Banten. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tatakelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi dasar utama sebagai rujukan terhadap di terbitkanya berbagai peraturan-peraturan daerah berikutnya. Maka implementasi keterbukan informasi publik dalam pengembangan sumberdaya Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten perlu melihat berbagai karakteristik kebijakan yang telah di terbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

1. **Regulasi Keterbukaan informasi Publik di Daerah**

Peraturan daeran Nomor 8 tahun 2012 tentang tatakelola keterbukaan informasi publik dalam penyelengaraan pemerintah. Dari peraturan daerah tersebut diterbitkan berbagai peraturan Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113-Huk/2017 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten, Keputusan Gubernur nomor 499.05/ kep.673-Huk/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten, Keputusan Gubernur nomor 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan keputusan Gubernur nomor 499.05/ kep.673-Huk/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten, Keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.144-Huk/2015 tentang Komisi Informasi Propinsi Banaten peiode 2015-2019, Keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tentang Penetapan Komisi Informasi Propinsi Bnaten peiode 2019-2023, Keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.144-Huk/2011 tentang Komisi Informasi Propinsi Banten peiode 2011-2015, Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Komisi Informasi Propinsi Banten , Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2021 tentang Standar Harga satuan Komisi Informasi Propinsi Banten, dan Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Propinsi Banten.

1. **Dukungan Anggaran APBD**

Implementasi keterbukaan informasi publik dan pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten, untuk tugas dan fungsinya melakat pada Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian propinsi Banten selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama. Kondisi tersebut membawa dampak pada anggaran yang di terima daro pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunya terjadi dinamisasi dan perubahan-perubahan.

Data perolehan pagu dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 telah tercantum dalam website dinas komunikasi, informatika, statistic dan persandian sebagai berikut; Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah sebesar sebesar Rp. 46.256.256.153,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.4.185.000.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 42.071.256.153,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017. Dari keseluruhan anggaran tersebut realisasinya sebesar Rp. 41.398.019.972,00 (89,50%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.944.089.814,00 (94,24%) dan Belanja Langsung Rp. 37.453.930.158,00 (89,02%).

Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten memiliki S Program yang terdiri dan 1 7 kegiatan serta satu kegiatan Belanja Tidak langsung dengan Pagu Anggaran sebesar lip. 49.184.390.000,- (empat puluh Sembilan milyard seratus delapan pu!uh empatjuta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). dengan realisasi sebesar Rp. 45.886.136.849,- (empat puluh lima milyard delapan ratus delapan puluh enam j uta seratus tiga pu!uh enam ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah),- atau 93.29 % dan pagu anggaran.Anggaran tersebut terbagoi dalam belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 11.622.000.000,- (sebelas milyard enam raths dua puluh dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.088.829.424.- (sepuluh milyard delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua pu!uh empat rupiah) atau 86.81%, dan belanja langsung sebesar Rp. 37.562.390.000,- (Tiga puluh tujuh milyard lima ratus enam puluh dua juta tiga rams Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 35.797.307.425,- (tiga puluh lima milyard tujuh rams Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratas dua puluh lima rupiah)

Pagu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2019 sebesar Rp. 48.747.710.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 45.359.088.696,- Atau 92.17% dan Pagu anggaran, anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Tidak Iangsung sebesar Rp. 15.848.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.209.339.328,- atau 89.66% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 32.899.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.351.688.591,-

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.552.260.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.332.599.127,- atau 96,57 % dan pagu anggaran, anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.055.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.635.588.037,- atau 96,52 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.497.260.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.697.011.090. pagu anggaran tersebut dapat dilihat lebih jelasnya dalam tabel dibawah ini :

Tabel

**Pagu anggaran Dinas Komunikasi informatika statistic dan persandian propinsi Banten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Alokasi** | **Realisasi** |
| 2017 | 46.256.256.153 | 42.071.256.153 |
| 2018 | 49.184.390.000 | 45.886.136.849 |
| 2019 | 48.747.710.000 | 45.359.088.696 |
| 2020 | 35.552.260.705 | 34.332.599.127 |

Dari dukungan anggaran yang diterima oleh dinas komunikasi informatika statistik dan persandian tersebut sejak tahun 2017-2020 menunjukan adanya penurunan dari aspek jumlahnya. Banyak faktor yang melatar belaknginya dinataranya penurunan jumlah Penadapatan Asli Daerah (PAD) serta dampak pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 sehingga mengakibatkan adanya refocusing anggaran. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada implementasi keterbukaan informasi publik dan juga pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

1. **Sumberdaya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, kedudukan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1. **Monitoring dan Evaluasi**

Sejak tahun 2011 hingga 2020, komisi informasi pusat telah menyenggarakan Monev sebagai mekanisme mengukur keterbukaan informasi publik disetiap badan publik. Hasil monev menjadi dasar bagi komsi informasi pusat dalam membuat pemeringkatan badan publik dari berbagai sisi. Sejak tahun 2013, pemeringkatan tersebut menggunakan metode penyebaran kuesioner penilaian Mandiri ( self assessment Quesionare/SAQ) keseluruh badan publik. Hasilnya diverifikasi dengan kunjungan TIM komsi informasi ke badan publik yang telah mendapat peringkatan sementara. Verifikasi dilakukan oleh TIM atas dokumen pembuktian yang ada di website badan publik atau yang berupa hard copy/sofcopy yang dilampirkan pada saat mengmebalikan kuisioner ke komisi informasi.

Tingkat keterlibatan Badan publik dalam kegiatan pemeringkatan, dari tahun 2013 hingga tahun 2021 cenderung meningkat. Dari jumlah peserta program Monev yang terus meningkat tersebut komisi informasi membagi 6 kelompokyang terdiri dari Kementerian, Pemerintah Propinsi, Lembaga Negara & lembaga non struktural, Badan usaha milik Negara, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.

Maka berdasarkan hasil monitoring dan evalusi keterbukaan informasi badan publik sampai tahun 2020, tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 menunjukan tren positif, meskipun secara kualifikasi masih mengalami naik turun. Hal ini bisa dilihat dari nilai atau peringkat naik turunnya peroleh dengan kriteria capainnya sebagai berikut: *tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif.* Jadi perolehan atau capaian badan publik tersebut setiap tahunnya tidak konsisten.

Propinsi Banten sebagai salah satu daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi oleh komisi inforamsi pusat, capaiannya juga tidak stabil. Sebagai bahan capainnya sebagai berikut tahun 2018 Cukup informatif, 2019 menuju informatif, 2020 informatif, dan 2021 informatif. Maka kecenderungannya naik untuk propinsi Banten dalam hal capaian kualifikasi tersebut. Namun hal ini terjadi dampak dari adanya komitmen, kolaborasi, inovasi, dan kordinasi yang baik antara pejabat pengelola informasi dan dolumentasi (PPID) uatama dan PPID pelaksana di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemerintah propinsi Banten.

Dari berbagai regulasi tentang Implementasi keterbukaan informasi publik terdapat sejumlah prinsip sebagai kerangka kerja untuk menentukan apakah jaminan terhadap pemenuhan Hak asasi Manusia (HAM) sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau badan publik, maka untuk menjawab hal tersebut ada 7 prinsip sebagai berikut :

1. **Keterbukaan Maksimum dan pengecualian yang Terbatas**

Informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga permintaan informasi tidak perlu disertai alasan dan menyertakan akses maksimal dengan pengecualian terbatas *(maxsimum access and limited exemption)*. Syarat legalitas pada dasarnya menyatakan bahwa pembatasan atas informasi harus berdasarkan regulasi yang jelas sehingga bisa dimaknai sebagai jaminan terhadap hak akses bagi pemohon dan pengguna informasi publik. Dengan demikian maka semua informasi yang dibatasi itu harus sesuai dengan “alasan yang sah” sebagaimana di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan jaminan terhadap 4 jenis hak atas informasi publik yaitu hak untuk mengetahui *(rigth to know*), hak untuk melihat dan memeriksa (*right to inspect*), hak untuk mendapatkan salinan dokumen atau hak akses (*right to obtain the copy*), dan hak untuk menyebarkan-luaskan informasi ( *the right to disseminate information).*

1. **Kewajiban untuk Mempublikasikan**

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi, bukan hanya berkewajiban untuk menyetujui permintaan atas informasi publik, akan tetapi badan publik di Propinsi Banten juga wajib mempublikasikan dan menyebarluaskan dokumen-dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik. Sebagai ilustasinya dissat pandemic covid 19 pemerintah daerah propinsi Banten wajib menyebarkan berbagai regulasi atau informasi tentang pandemic tersebut terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentang kesehatan.

.

1. **Promosi Pemeintahan yang Terbuka**

Promosi sebagai pemerintah daerah yang terbuka maka di perlukan berbagai upaya yang dilakukan yaitu adanya pelatihan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan Pelaksana di propinsi Banten, diberikannya tunjangan atau insentif kepada para petugas pelaksana di PPID, dan adanya laporan secara periodik tentang lalayan informasi publik (LLIP) dari setiap badan publik yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah propinsi Banten.

1. **Proses memfasilitasi Akses**

Permintaan informasi publik harus di proses secara cepat dan adil oleh badan publik, kemudian harus tersedia mekanisme yang jelas tentang prosedur dan tata cara permohonan informasi tersebut, serta ada jaminan hukum apabila informasi publik tersebut tidak bisa diakses oleh pengguna/pemohon informasi. Terhadap permohonan informasi publik yang tidak diberikan atau diberikan tetapi pemohon dan pengguna informasi publik teresbut merasa tidak puas, maka mekanisme yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan permohona penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi propinsi Banten. Adanya mekanisme untuk mengatasi sengketa informasi publik secara independen tentu ini diharapakan baik oleh pemohon maupun oleh badan publik itu sendiri. Termasuk untuk mengajukan banding ke peradilan lainnya dalam hal ini pengadilan tatausaha negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) untuk melihat lebih jauh atau meninjau putusan komisi informasi propinsi Banten.

1. **Biaya Murah**

Akses terhadap informasi tidak boleh dihambat oleh biaya mahal yang dibebankan kepada pengguna informasi publik, karena ini bertentangan dengan undang-undang 14 tahun 2008. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan pelaksana undang-undang tersebut segala biaya terkait permohonan informasi dibebankan kepada pemohon. Namun demikian harus ada standar biaya yang berlaku di daerha tersebut tentang besaran memperoleh informasi publik terutama yang berbentuk hardcopy. Propinsi Banten dengan delapan wilayah kabupeten/kota tentu telah memiliki standar satuan harga tentang biaya penggandaan informasi publik. Hal ini tertuang dalam peraturan Bupati/walikota.

1. **Pengutamaan Keterbukaan Maksimum**

Turunan dari prinsip keterbukaan maximum dan pengecualian yang terbatas membawa konsekuensi bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan maksimum harus dicabut dan diamandemen. Jika ada konflik antara peraturan-peraturan yang menutup informasi dan akses pada informasi, maka ketentuan keterbukaan atas informasi diutamakan. Prinsip ini konsisten dengan prinsip pembatasan atas keterbukaan informasi.

1. **Perlindungan Whistelblower**

Pemohon informasi dan atau pengguna informasi yang menyebarluaskan informasi publik atas kesalahan badan publik *(Whistelblower)* maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan dari negara. Dengan demikian dalam prinsip ini diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum. Perlindungan ini tentu menyediakan konsep pengamanan bahwa informasi penting itu benar-benar sampai kepada publik. Hal ini juga sejalan dengan adanya perubahan budaya di suatu daerah termasuk di propinsi Banten tentang “kerahasian” informasi publik sesuai dengan pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008. Aparur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai pejabat pengeloal informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana tentu sangat berkepentingan dengan adanya kepastian hukum terhadap Perlindungan *Whistelblower.*

Strategi yang dikemukan dalam penelitian ini adalah strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dapat di tunjang oleh pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi dengan pendekatan regulasi keterbukaan informasi publik
2. Strategi pengembangan sumberdaya PPID
3. Strategi pemenuhan sarana prasarana website
4. Strategi pendidikan dan latihan terhadap PPID Pelaksana
5. Strategi Maksimum akses limited Edisien(MALE)
6. Strategi standar operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa temuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi kebijakan keterbukaan informasi publik di lakukan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.
2. Strategi pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di propinsi Banten di perlukan strategi pengembangan-pengembangan faktor internal dan ekternal.
3. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumberdaya Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dikatakan berhasil jika dampaknya pada peningkatan capaian pemerintah propinsi menjadi Informatif secara terus menerus.

**5.SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumber daya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di propinsi Banten diantaranya :
2. Karakteristik Masalah, secara umum masalah yang dihadapi oleh pemerintah propinsi Banten untuk mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik terletak pada kesiapan perangkat daerah di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana di 39 Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk konsisten mengimplementasikan Standar layanan informasi Publik (SLIP) sesuai peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang terakhir sudah mengalami perubahan dengan Peraturan komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2021. Masalah berikutnya terletak dari sangat banyaknya permohonan informasi publik yang di mohonkan oleh pemohon informasi kepada setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi propinsi Banten dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 2.138 register.
3. Karakteristik kebijakan, peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 telah menjadi dasar untuk menerbitkan kebijakan daerah lainnya tentang implementasi keterbukaan informasi publik di propinsi Banten dengan menerbitkan berbagai regulasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Keputusan Gubernur nomor 499.05/ kep.673-Huk/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Bante, Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113-Huk/2017 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di propinsi Banten juga dilaksanakan melalui pembentukan komisi informasi propinsi dengan terbitnya keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.144-Huk/2011 tentang Komisi Informasi Propinsi Banten peiode 2011-2015, keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.144-Huk/2015 tentang Komisi Informasi Propinsi Banten periode 2015-2019 tentang komisi Informasi Propinsi Banten Periode 2015-2019, dan keputusan Gubernur nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tentang Penetapan Komisi Informasi Propinsi Banten peiode 2019-2023.
4. Aspek lingkungan, Propinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 4 Oktober. Sudah 21 tahun propinsi Banten dibentuk, namun budaya untuk terbuka tentang berbagai kebijakan terutama anggaran masih sulit dilakukan, karena faktor budaya serta penyalahgunaan anggaran masih sering terjadi, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi Banten sejak tahun 2002 sampai tahun 2021. Maka merubah budaya serta lingkungan kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) akan berkaitan erat dengan semangat keterbukaan informasi dilingkungan birokrasi saat ini.

1. Strategi yang diterapkan agar Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik maksimal. Hasil analisis SWOT, maka strategi yang dapat di terapkan agar kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengembangan sumberdaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah (1) strategi dengan menerbitkan peraturan Gubernur dan atau keputusan Gubernur tentang implementasi keterbukaan informasi publik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan ; (2) strategi untuk mencapai Propinsi Banten dengan Katagori informatif tingkat nasional maka penguatan Sumber daya manusia di PPID Utama di Dinas komunikasi, informatika statistiK dan persandian perlu ditingkatkan; (3) penguatan pada sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, dan regulasi tentang keterbukaan informasi publik.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, James E. 2013. *Public Policy Making*. Boston: Haugton Mifflin Co.

Arifin, Anwar. 2004. *Strategi Komunikasi*. Bandung. Armilo.

Arikunto, Suhasimi. 2008. Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek. Jakarta : PT. Rineka cipta

Brannden, Julia,1992 Mixing Methods: *Qualitatif and Quantitatif Research*. Brookfileld. USA: Avebury, Aldershot Publisher

Denhardt, Janet Vinzant and Denhardt, Robert B. 2004. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe

Dye, Thomas R. 2013. *Understanding public policy*. 14th Edition, Florida : Pearson.

Golembiewski, Robert T. dan Eddy, William B. 2011. *Organization Development in public administration*. Boca Raton: CRC Press.

Gustama, Dielson B. S. 2013. *Exploring policy implementation problems and solution*. Washington DC: Liberal Study Inc.

Golembiewski, Robert T dan Eddy, William B. 2011. *Organization Development in public administration*. Boca raton: CRC Press

Gerry Dessler. 2015. *Manajemen Sumber daya manusia*. Salemba Empat. Jakarta

Heru, Bambang. 2008. *Manajemen Strategik*. Bandung. Prisma Press.

Hamel, Gary, dan Prahalad, CK. 2000. *Kompetisi masa depan; strategi-strategi terobosan untuk merebut kendali atas industry anda dan menciptakan pasar masa depan*, Jakarta : Binarupa.

Hunger, David dan Wheelen, Thomas L. 2003. Yogyakarta :

Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara. Jakarta : Bumi aksara

Kartasastima, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk rakyat. Jakarta. PT. Pustaka CIDESINDO

Keban, Yeremias.2014. *Enam dimensi sttategis adminsitarsi publik, konsep, teori, dan issu*. Jogyakarta : Grava Media

Khun, Thomas S. 2013. *Peran paradigma dalam revolusi Sains*, cetakan kedua, alih Bahasa Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Makinde, T. 2015. *“ Problems of Policy Implementation*”. Journal of Social Science. Vol. 11 no. 1.

Najam, A. 2014. *Policy Implementation : A synthesis Perspective*. Lexemburg: IIASA

Nigro, Felix A, dan Nigro, Lloyd G. 2010. *Modern Public Administration* , 5th edition. New York : Harper and Row

Nugroho, Riant, D. 2014. Kebijakan publik : Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta : Elex media Komputindo

Parson, W, 2006. *Public policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*. Aldreshot Edward Elgar publishing united kingdom.

Raymond A, Noe, etc . 2011. Manajemen sumber daya manusia : mencapai keunggulan bersaing. Jakarta. Salemba empat.

Santoso, Purwo. 2008. Menembus ortodoksi kajian kebijakan public. Yogyakarta. FISIPOL UGM

Starling, G, 2011. *Managing the Public Sector*. 5th Edition, Florida; Harcourt Brace and Company

Suradinata, Ermaya. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan kebijakan publik, peradaban. Jakarta : Erlangga

Seibel, Wolfgang. 2015. *Hybridity and Responsible leadership in public administration*. Duisburg : DVPW Press.

Silalahi, ulbert. 2013. Asas-asas manajemen. Bandung. PT Refika Aditama

Smith, Stephen L.J. 2010. *Tourism analysis* : a Hanbook. New York : John Wiley & Sons, Inc.

Sulaiman, Amir Hamzah. 2008. Media auto visual : Kebijakan publik. Jakarta: PT Gramedia

Thoha, Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Thoha, Miftah. 2012. *Dimensi-dimensi prima ilmu adminsitrasi Negara*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Tachjan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Vasely, A. 2015. *“ Problem solving in public policy analysis”.* Center European Journal Of Public Policy. Vol. 3 no.5.

Wahab, Solihin Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

**REGULASI**

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik
4. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undanf nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
5. PERKI nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan teknik evaluasi ketrbukaan informasi Badan publik
6. Pergub nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilingkungan pemerintah propinsi Banten
7. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tatakelola informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
8. KepGub nomor 489.1/kep.113-Huk/2017 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten
9. Keputusan Gubernur nomor 499.05/ kep.673-Huk/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten
10. KepGub nomor 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan keputusan Gubernur nomor 499.05/ kep.673-Huk/2011 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Propinsi Banten
11. Kepgub nomor 491.05/Kep.144-Huk/2015 tentang Komisi Informasi Propinsi Bnaten peiode 2015-2019
12. Kepgub nomor 491.05/Kep.348-Huk/2019 tentang Penetapan Komisi Informasi Propinsi Bnaten peiode 2019-2023
13. Kepgub nomor 491.05/Kep.144-Huk/2011 tentang Komisi Informasi Propinsi Banten peiode 2011-2015
14. Pergub nomor 49 tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Komisi Informasi Propinsi Banten
15. Pergub nomor 46 tahun 2021 tentang Standar Harga satuan Komisi Informasi Propinsi Banten
16. Kep Ketua KIP RI no 11/Kep/KIP/XI/2019 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019
17. Kep Ketua KIP RI no 09/Kep/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020
18. PERKI 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik
19. PERKI 1 tahun 2010 dengan perubahan terakhir menjadi PERKI 1 tahun 2021 tentang Standar layanan informasi Publik
20. Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Propinsi Banten